

**RESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA
(STUDI TERHADAP PASAL 10 AYAT 5 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004)**

**R. Sondang Tinambunan, SH
A21208031**

ABSTRACT

This thesis focuses on the recentralization of government affairs between the Government and Local Government in the constitutional system of Indonesia (the study of article 10 , paragraph 5, letter a of Law No. 32 of 2004 . Outcome of the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; Inside article 10 paragraph (5) letter a of Law No. 32 of 2004 which states " organize their own affairs ." It can be interpreted that any time the government can organize their own affairs without requiring approval from the local government . recentralisation this means is still attached and adopted in the law further concurent principles and criteria which include the principle , it is inversely proportional to the spirit of autonomy daerah itself. particularly west Kalimantan provincial government is unable to control many types of motor vehicles that are not cars back to the country of origin of the car , while the government center kebijakannya unclear about the conditions experienced by local governments . Recommendation as a form of suggestion is Law No. 32 Year 2004 on regional Government should immediately be revised , phrases in the legal norms should be more assertive and not give rise to multiple interpretations and should eliminate suggests that decentralization is described by a half-hearted , so that the form may recentralization no longer exist .

ABSTRAK

Tesis ini menitikberatkan pada resentralisasi urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (studi terhadap pasal 10 ayat 5 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004). Hasil dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan; Di dalam pasal 10 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan”. Ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah setiap saat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah. Hal ini berarti resentralisasi masih melekat dan dianut dalam undang-undang tersebut selanjutnya prinsip concurrent dan kriteria yang meliputi dari prinsip tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerah itu sendiri. Khususnya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat tidak mampu mengendalikan banyaknya kendaraan bermotor jenis mobil yang tidak kembali ke negara asal mobil tersebut, sementara pemerintah pusat tidak jelas kebijakannya tentang kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah. Rekomendasi sebagai bentuk saran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus segera dilakukan revisi, frase-frase dalam norma undang-undang harus lebih tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir dan harus menghilangkan kesan bahwa desentralisasi dijabarkan dengan setengah hati, sehingga bentuk resentralisasi tidak mungkin lagi ada.

A. Latar belakang Penelitian

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan, dalam praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan sepanjang perjalanan sejarah mengalami pasang surut. Dimulai sejak awal kemerdekaan sampai saat ini terjadi perubahan-perubahan, baik dari sisi konsep maupun kecenderungannya ke arah sentralisasi atau desentralisasi. Pasang surut tersebut berlangsung sangat dinamis, puncaknya terjadi praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sangat sentralistik dalam kurun waktu yang lama di masa orde baru, yang mengakibatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai dan proses demokratisasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralisasi membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang lebih kecil. Pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai otonomi daerah. Salah satu cita-cita reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 yaitu mengubah sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik sebagaimana yang diatur dalam uu nomor 5 tahun 1974. Cita-cita tersebut kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan :

1. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas=luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. politik luar negeri;
 - b. Pertahanan;
 - c. Keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan

f. agama

4. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
5. Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Terkait urusan pemerintahan, maka bagi daerah diberikan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 13 dan pasal 14 (1) yang menyatakan :

Pasal 13

- 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;

- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekahasaan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

- a. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten /kota meliputi :
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil; dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di atur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat menjalankan apa yang telah menjadi urusan-urusannya masing-masing dalam menjalankan pemerintahan.

Titik persoalan adalah sifat desentralisasi dalam pelimpahan urusan tidak sepenuhnya di berikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Undang-undang nomor 32

tahun 2004 khususnya pada pasal 10 ayat (5) huruf a, yang menyatakan “menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;” mengindikasikan bahwa pemerintah berhak mengurus urusan selain selain 6 (enam) urusan pemerintahan yang telah dimiliki. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan asas desentralisasi dalam negara kesatuan. Dengan kata lain sifat sentralistik dalam penyelenggaraan urusan pemerintah masih mewarnai sistem pembagian urusan pemerintahan yang nota bene sudah tidak dianut dan ditinggalkan karena membuat daerah tidak bebas dan leluasa dalam melakukan pembangunan di daerah.

Lebih lanjut, penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Ketentuan ini tidak secara tegas menyebut pada hal apa suatu urusan pemerintahan yang concurrent dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah atau didesentralisasikan. Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, yang disebabkan antara lain oleh lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di antara tingkatan.¹ Oleh beberapa pihak, inilah yang disebut dengan “otonomi setengah hati”.

Potensi untuk terjadinya resentralisasi sangat mungkin terjadi dan sudah juga terjadi dimana pemerintah memainkan peran yang cukup besar dalam urusan pemerintahan dimana urusan pemerintahan tersebut dapat dikelola sendiri oleh pemerintah daerah secara bertanggungjawab dan berdaya guna. Sebagai contoh kecil dari bentuk resentralisasi yakni ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk membuat regulasi terhadap mobil-mobil luar negeri yang masuk ke wilayah suatu daerah, misalnya Kalimantan Barat, Posisi Kalimantan Barat yang secara langsung berbatasan dengan negara lain menunjukkan mobilitas yang cukup tinggi terhadap arus kendaraan yang masuk dan seiring dengan hal tersebut terjadi persoalan terhadap kendaraan –kendaraan yang tidak kembali ke asal kendaraan tersebut. Pemerintah daerah yang secara langsung berhadapan terhadap permasalahan tersebut tidak dapat berbuat apa-apa karena hal ini menjadi urusan pemerintah pusat.

Begitu juga dalam bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang selanjutnya diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, dimana pemerintah justru mempunyai andil yang cukup besar dalam mengatur perizinan pertambangan, selayaknya hal ini diberikan saja kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya secara

¹ Indra J. Piliang ed., *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003, hal. 13

keseluruhan sehingga hasil-hasil dari pertambangan tersebut bisa secara langsung dinikmati oleh pemerintah daerah yang dialokasikan pada pendapatan daerah.

Dari uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “ RESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PASAL 10 AYAT 5 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004)

B. Permasalahan Penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdapat pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Apakah dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih terkandung prinsip-prinsip sentralistik dalam pembagian urusan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.?

PEMBAHASAN

Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus urusan rumah tangga dalam satuan pemerintahan daerah, dimana Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah tidak diartikan dalam sebuah bentuk kemerdekaan, akan tetapi lebih diarahkan pada ikatan bernegara dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Arah kebijakan otonomi daerah menurut Joko Widodo² ditujukan :

1. Demokrasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Pemberdayaan masyarakat dan daerah.
3. Peningkatan kualitas layanan masyarakat.
4. Peningkatan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan.
5. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Terbebasnya praktek penyelenggaraan pemerintahan dari malpraktek

Untuk mewujudkan arah kebijakan otonomi daerah yang ideal tersebut, ternyata bukanlah hal yang mudah, karena dalam penerapannya pada praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan desentralisasi dan otonomi daerah sepanjang sejarah Indonesia sampai saat sekarang ini telah menampilkan gambaran yang bervariasi, yang secara umum dipahami mencerminkan tarik ulur sifat sentralistik dan desentralistik. Ini berarti ada pemahaman yang beragam atas otonomi daerah itu sendiri. Meskipun demikian, apapun rumusan atau ungkapannya, otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat.³

Jimly⁴ menegaskan bahwa dalam negara kesatuan (unitary state) kekuasaan asli itu memang berada di pemerintah, bukan di daerah, yang diberikan ke daerah bukanlah kekuasaan asli tanpa atribut tetapi kekuasaan yang sudah dilegalisasikan yang biasa disebut sebagai kewenangan . dengan demikian daerah hanya menerima saja apa yang telah diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan

Hubungan kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, sebagai berikut : ⁵

² Joko widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayu Media Publlshing, Malang , 2008. Hal. 6

³ Hari Sabarno, *Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Penerbitan Buku Beberapa Gagasan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* dalam Owen Podger dkk, *Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. iv

⁴ Jimly Assyiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 282

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance Dalam...*, Op.cit., hal. 43

1. Tidak ada hubungan hierarki antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/kota, tetapi terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan.
2. Tidak ada prinsip monopoli dalam kewenangan administratif (kewenangan bersifat sharing antara pusat-provinsi-kabupaten/kota)
3. Kewenangan tidak selalu identik dengan pembentukan dinas.
4. Penyelenggaraan kewenangan tidak selalu harus oleh pemerintah (dapat ditempuh model kemitraan, swastanisasi, dan lain-lain).

Alasan konstitusional yang mendasari perubahan UU No. 22 Tahun 1999, sebagaimana terdapat pada penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 dengan dasar pemikiran sebagai berikut : “Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, disamping karena adanya perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa Ketetapan MPR dan Keputusan MPR, seperti ; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI Untuk Menyampaikan Saran Atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK, dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Resentralisasi urusan pemerintahan juga tampak di dalam pasal 10 ayat (5) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan”. Ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah setiap saat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah. Dalam kondisi tertentu, apabila dipandang sangat perlu, maka urusan-urusan yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah diambil alih oleh pemerintah. Kondisi seperti inilah yang membuat pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan potensi daerahnya. Kebijakan-kebijakan strategis selalu diambil alih oleh pemerintah, sehingga pemerintah daerah hanya mampu untuk mengikuti kebijakan pemerintah tersebut tanpa bisa banyak berbuat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikenal prinsip “**concurent**” yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat

dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan pada provinsi dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan prinsip tersebut, maka ada 3 (tiga) kriteria yakni kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Eksternalitas diartikan bahwa pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan pemerintah. Selanjutnya akuntabilitas diartikan bahwa pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat/langsung dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Efisiensi diartikan bahwa pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketetapan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah, maka urusan tersebut harus diserahkan pada daerah.

Prinsip concurrent dan kriteria yang meliputi dari prinsip tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerah itu sendiri. Sebagaimana telah dicontohkan dalam latar belakang, bahwa pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat tidak mampu mengendalikan banyaknya kendaraan bermotor jenis mobil yang tidak kembali ke negara asal mobil tersebut, sementara pemerintah pusat tidak jelas kebijakannya tentang kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah. Jika kondisi ini dikaitkan dengan prinsip concurrent dan kriteria baik eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, seharusnya urusan ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat karena dampak yang ditimbulkan ada pada daerah bukan pada pemerintah pusat.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Di dalam pasal 10 ayat (5) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan “menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan”. Ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah setiap saat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah. hal ini berarti resentralisasi masih melekat dan dianut dalam undang-undang tersebut selanjutnya prinsip concurent dan kriteria yang meliputi dari prinsip tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerah itu sendiri. khususnya pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tidak mampu mengendalikan banyaknya kendaraan bermotor jenis mobil yang tidak kembali ke negara asal mobil tersebut, sementara pemerintah pusat tidak jelas kebijakannya tentang kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah.

B. Saran.

Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus segera dilakukan revisi, frase-frase dalam norma undang-undang harus lebih tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir dan harus menghilangkan kesan bahwa desentralisasi dijabarkan dengan setengah hati, sehingga bentuk resentralisasi tidak mungkin lagi ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2000,
- Bhenyamin Hoessein, Perubahan Model, Pola dan Bentuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2009,
- , Pengaturan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Makalah, Loka Karya Nasional yang diselenggarakan oleh MIPI dan APPSI, Jakarta, 2008
- , *Evaluasi Yuridis UU 22/1999*, dalam Sudarsono Hardjosoekarto (Mantan Dirjen Otda Depdagri), *Hubungan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi, dan Otonomi Daerah*, Materi Ceramah, Jakarta, 2004
- B.C. Smith dalam Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah. Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kelapa Daerah, Alumni, Bandung, 2008
- B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah, Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998
- Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 18 Februari 2003),
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal. 196
- Dwi andayani Budisetyowati, Hukum Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Roda Inti Media, Jakarta, 2009
- Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, 2003
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- GTZ-SFDM, Naskah Akademis : Isu Kewenangan, Masukan Untuk Penyempurnaan UU. No. 22 Tahun 1999, Jakarta, 2002

- Hari Sabarno, Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Penerbitan Buku Beberapa Gagasan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Owen Podger dkk, *Beberapa Gagasan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
- Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Indra J. Piliang ed., *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1984,
- Joko widodo, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayu Media Publshing, Malang , 2008.
- Jimly Assyiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni Bandung, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1998,
- , *Membangun Politik , Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006
- Ni”matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009,
- Oentoro Sindung Mawardi, *Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Permasalahan dan Tantangan*, Makalah, Jakarta, 2002.
- Riswhandha Imawan dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penemuan Hukum*, , Ghalian Indonesia, Jakarta 1982,
- Sri Soemantri M. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni Bandung, 1987
- S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Sodjuangan Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten, Kota*, Disertasi universitas Indonesia, Jakarta, 2002

- Sedarmayanti, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Soerjono Soenkanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995,
- Supomo, Pidato Pada Tanggal 31-5-1945 Dalam Rapat Badan Penyelidik Untuk Persiapan Indonesia Merdeka, Di Gedung Chuoo Sang – In Jakarta, Dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, Jakarta, 1945
- Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Edisi II, STPDN, Fokus Media, Bandung, 2003
- Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda. Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940), Bayumedia, Malang, 2005
- W. Riawan Tjandra, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Analisis Kritis Terhadap Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2004
- Wawan Sobari dkk, Inovasi Sebagai Referensi, Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award, Jawa Post Institut of Pro-Otonomi, Surabaya, 200

PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.